

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILAHAN SAMPAH DALAM PERDA KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2015

Agosnaldi<sup>1</sup>, Agus Hendrayady, Edison<sup>2</sup>

## ABSTRACT

*UPTD TPA Ganet Tanjungpinang in sorting waste according to Regional Regulation No. 3 of 2015 concerning Waste Management contained in article 25 paragraph 4 regarding waste segregation is divided into five categories. There are still some deficiencies found, namely from human resources, of course from the lack of waste sorting. can not fully follow the contents of the regulation. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Analysis of the data obtained is carried out through data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. This study uses the Edward III Implementation model with four indicators. The results of the study are seen from the indicators used, namely 1) Communication that is running less than optimal, this can be seen from the objectives achieved not yet maximized in sorting waste, 2) Existing resources are still lacking in sorting waste, 3) Disposition in conducting waste sorting is quite optimal, this can be seen from the appointment of positions that are in accordance with their capabilities, 4) Bureaucratic structure is quite optimal, this is evidenced by the existing SOP in the Tanjungpinang Landfill TPA. Conclusion that the Implementation of Regional Regulation Number 3 Year 2015 Regarding Solid Waste Management (Study on Waste Sorting in the Technical Implementation Unit of Tanjungpinang Ganet Final Processing Station) has not been running optimally because it has not yet followed the SOP including not yet separating waste divided into five categories, and staff limitations in sorting waste. The suggestion that researchers can convey is that the UPTD TPA Ganet Tanjungpinang follows the SOP that has been set and conducted training for waste sorting officers and adding staff in the field.*

**Keywords: Implementation, Policy, Waste Sorting**

## ABSTRAK

UPTD TPA Ganet Tanjungpinang dalam melakukan pemilahan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan yang terdapat dalam pasal 25 ayat 4 mengenai pemilahan sampah dibagi menjadi lima kategori tersebut masih ditemukan beberapa kekurangan yaitu dari sumberdaya manusia, tentu dari kekurangan tersebut pemilahan sampah yang dilakukan tidak bisa sepenuhnya mengikuti isi dari Perda tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data yang diperoleh dilaksanakan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan model Implementasi Edward III dengan empat indikator. Hasil penelitian dilihat dari indikator yang di pakai yaitu 1) Komunikasi yang berjalan kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fisip, Umrah

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Administrasi Negara Fisip, Umrah

tujuan yang dicapai belum maksimal dalam melakukan pemilahan sampah, 2) Sumber daya yang ada masih kurang dalam melakukan pemilahan sampah, 3) Disposisi dalam melakukan pemilahan sampah cukup optimal, hal ini dilihat dari pengangkatan jabatannya sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, 4) Struktur birokrasi cukup optimal, hal ini terbukti dengan adanya SOP yang ada di TPA Ganet Tanjungpinang. Kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan (Studi Pada Pemilahan Sampah Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Ganet Tanjungpinang) belum berjalan secara optimal karena belum mengikuti SOP diantaranya belum dilakukan pemilahan sampah yang dibagi atas lima kategori, dan keterbatasan petugas dalam melakukan pemilahan sampah. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu agar UPTD TPA Ganet Tanjungpinang mengikuti SOP yang telah ditetapkan dan dilakukan pelatihan bagi petugas pemilahan sampah serta menambah pegawai dibidang tersebut.

### **Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemilahan Sampah**

#### **I. PENDAHULUAN**

Sistem pengelolaan persampahan terutama di daerah perkotaan harus dilaksanakan secara tepat dan sistematis. Kegiatan pengelolaan persampahan akan melibatkan penggunaan dan pemanfaatan berbagai prasarana dan sarana persampahan yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan maupun pembuangan akhir. Masalah sampah berkaitan erat dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri.

Selama ini, sampah identik dengan masalah. Sampah selalu saja dianggap sebagai barang yang tidak berguna, bahkan ada yang menganggap sampah adalah barang yang menjijikkan. Meningkatnya sampah tersebut dapat berasal dari sampah rumah tangga, Industri, kegiatan pembangunan, perdagangan dan lainnya. Permasalahan sampah ini diantaranya, produksi sampah yang terus meningkat setiap tahunnya, hal ini membuat sulitnya permasalahan sampah untuk diatasi.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan sampah pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan. Pengelolaan persampahan yang dimaksud salah satunya adalah dengan melakukan pemilahan sampah, dimana yang tercantum dalam pasal 25 ayat 4 yaitu :

Jenis dan sifat sampah sebagaimana dimaksud paling sedikit dibedakan menjadi:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mudah terurai;
- c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. Sampah lainnya.

Syarat sarana dan prasarana pemilahan sampah yang dimaksud diantaranya yang terdapat didalam pasal 28 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tentang Pengelolaan Persampahan yaitu :

1. Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan didasarkan pada:
  - a. volume sampah;
  - b. jenis sampah;

- c. penempatan;
  - d. jadwal pengumpulan; dan
  - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
2. Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. diberi label atau tanda;
  - b. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah; dan
  - c. menggunakan wadah yang tertutup.

Dengan demikian, dalam proses pemilahan sampah terdapat berbagai macam faktor pendukung diantaranya, angkutan persampahan yang dibedakan sesuai dengan jenis sampah kemudian perwadahan atau TPS juga dibedakan sesuai dengan jenis sampah, perbedaan yang dimaksud salah satunya dengan membedakan warna sesuai dengan jenisnya.

Seperti yang telah diterapkan di Kota Tanjungpinang mengenai perwadahan atau tempat sampah 5 (lima) warna sesuai dengan jenis sampah yang ditentukan. Berikut dijelaskan warna tempat sampah dan fungsinya antara lain :

**Tabel I.1**  
**Tempat sampah 5 warna dan fungsinya**

No	Warna	Fungsi
1	Hijau	Tempat sampah organik (sampah yang mudah terurai) seperti daun-daunan, bekas sayuran. Sampah inilah yang dimanfaatkan untuk pembuatan kompos.
2	Kuning	Tempat sampah non organik (sampah yang dapat digunakan kembali) seperti plastik bekas, gelas bekas air mineral kemasan jenis plastik.
3	Merah	Tempat sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun), seperti kaca, bekas detergen, obat nyamuk dan jarum suntik.
4	Biru	Tempat sampah khusus kertas atau sampah yang dapat didaur ulang. Salah satu manfaatnya adalah untuk mempermudah proses daur ulang.
5	Abu-abu	Tempat sampah residu. Artinya tempat sampah ini boleh diisi sampah-sampah selain 4 jenis tersebut.

Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan dimana yang terdapat di dalamnya pasal 25 ayat 4 mengenai pemilahan sampah yang dibagi menjadi lima katagori, tentunya dengan adanya pemilahan tersebut bisa mengurangi tumpukan sampah yang ada di TPA Ganet dan juga hasil pilahan sampah yang dilakukan yaitu sampah jenis organik ini bisa di proses menjadi kompos. Sedangkan sampah non organik seperti botol, kaleng itu bisa dijual, sementara pemulung juga bisa ikut memilah dengan mengambil jenis sampah yang ada nilai ekonominya, seperti sampah non organik dan sampah yang bisa didaur ulang, sehingga dengan adanya pemilahan sampah tersebut bisa mambantu meningkatkan perekonomian pemulung yang ada. Kemudian sisa sampah yang tidak habis dipilah atau tidak termasuk pilahan ini dilakukan penimbunan dan penanaman yang dikelola agar menghasilkan gas metan, dengan tujuan mengurangi bau busuk yang ditimbulkan tumpukan sampah yang ada.

Menurut Edward III (1980:9) <sup>3</sup>terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. *Communication (Komunikasi)*

*For implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the policies decisionmakers wish to see implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed.*

Agar implementasi menjadi efektif, mereka yang memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan sebuah keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Peraturan tentang kebijakan-kebijakan implementasi harus disalurkan kepada orang-orang yang bersangkutan, dan mereka harus bersih, akurat, dan konsisten. Jika pembuat kebijakan-kebijakan berharap untuk melihat implementasi belum ditentukan secara spesifik, mereka mungkin akan disalahpahami oleh orang-orang yang mengarahkan mereka.

2. *Resources (Sumber Daya)*

*Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise, relevant, and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation, the authority to ensure that policies are carried out as they are intended, and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services.*

Sumber daya yang penting termasuk para pekerja yang tepat dan dengan keahlian yang tepat, relevan serta dengan informasi yang memadai tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan-kebijakan, dan pada orang lain yang terlibat secara patuh dalam pelaksanaan, otoritas yang memastikan kebijakan-kebijakan berjalan dengan semestinya, serta fasilitas- fasilitas (termasuk bangunan-bangunan, peralatan, lahan, dan perlengkapan lainnya) untuk menyediakan pelayanan-pelayanan.

3. *Disposition (Disposisi)*

*If implementation is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementors can exercise considerable discretion in the implementation of policies. The way in which implementors exercise their direction. However, depends in large part upon their disposition toward the policies. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies and by how they see the policies affecting their organizational and personal interests.*

Jika implementasi ingin berjalan dengan efektif, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus memiliki keinginan untuk menjalankan kebijakan itu. Kebanyakan implementor dapat menerapkan kebijaksanaan yang cukup dalam mengimplemetasikan kebijakan-kebijakan. Cara di mana para implementor melatih arah mereka. Namun, tergantung pada bagian besar atas

---

<sup>3</sup> Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C. Congressional Quarterly Press

disposisi mereka terhadap kebijakan-kebijakan. Etika-etika mereka, pada saatnya, akan dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kebijakan-kebijakan dan bagaimana mereka melihat kebijakan-kebijakan memengaruhi lembaga-lembaga dan kepentingan-kepentingan pribadinya).

#### 4. *Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)*

*Even if sufficient resources to implement a policy exist and implementors know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure .As organizational units administer policies they develop standard operating procedures (SOP) to handle the routine situations with which they regularly deal.*

Bahkan jika sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan yang ada dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan menginginkan melakukannya, implementasi mungkin masih bisa digagalkan karena kekurangan pada struktur birokrasi. Sebagai unit lembaga yang mengelola kebijakan-kebijakan mereka mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menangani situasi-situasi rutin yang biasanya mereka hadapi setiap saat.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dari penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak (Sugiyono, 2016:9)<sup>4</sup>. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga bisa bersifat komperatif dan korelatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi (Narbuko; 2015:44)<sup>5</sup>.

## **III. PEMBAHASAN**

Analisa adalah kegiatan untuk mempertajam data yang diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informannya guna mengidentifikasi lebih dalam tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Untuk itu pada penelitian ini, peneliti akan menyajikan dan menganalisa data hasil penelitian secara lengkap dari proses penyelenggaraan pemilahan sampah sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan dimana yang terdapat di pasal 25 ayat 4 mengenai pemilahan sampah yang dibagi menjadi lima jenis sampah yaitu : sampah organik, sampah non organik, sampah bahan berbahaya dan beracun (B3), sampah yang bisa daur ulang dan sampah lainnya.

Untuk melihat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Studi Pada Pemilahan Sampah Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ganet Tanjungpinang peneliti melakukan wawancara dengan mengacu pada teori

---

<sup>4</sup> Sugiyono 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

<sup>5</sup> Narbuko, Cholid. Achmadi, Abu. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT Bumi Aksara.

implementasi menurut Edward III (1980: 9) ada empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

### *1. Komunikasi*

Komunikasi menurut Edward III dalam Agustino (2016:137) adalah “Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan”. Mengenai komunikasi dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Studi Pada Pemilahan Sampah Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ganet Tanjungpinang sudah dilaksanakan oleh UPTD TPA Ganet Tanjungpinang sebagai pelaksana dari peraturan khususnya pemilahan sampah tersebut. Kepala UPTD TPA Ganet melakukan komunikasi kepada pengawas pemilahan maupun petugas pemilahan pada saat apel pagi yang dilaksanakan setiap harinya kecuali hari sabtu dan minggu, dan apel pagi tersebut diikuti seluruh pegawai dan petugas pemilahan sampah tanpa terkecuali. Pada saat apel pagi, pegawai dan petugas pemilahan diberikan arahan, dan kejelasan untuk melakukan tugasnya.

Kemudian secara teknis dikatakan bahwa kategori sampah bahan berbahaya dan beracun (B3), TPA Ganet tidak menampungnya. Sementara fakta dilapangan menyatakan semua jenis sampah itu masuk ke TPA Ganet walaupun sedikit jumlahnya. Tetapi pemilahan yang dilakukan tetap berdasarkan perintah yang diberikan. Perintah yang diberikan kepada petugas pemilahan tersebut adalah dengan melakukan pemilahan jenis sampah organik dan sampah non organik, pemilahan ini dilakukan secara bersamaan dengan pemulung yang masuk ke TPA Ganet dan pemulung ini mengambil jenis sampah yang ada nilai jualnya seperti sampah yang bisa di daur ulang dan sampah non organik.

Sementara petugas pemilahan yang jumlahnya 4 orang maupun pemulung dengan jumlah sekitar 20 orang yang melakukan pemilahan atau mengambil sampah dengan jenis sampah organik, non organik dan sampah yang bisa didaur ulang ini tidak memilah semuanya, hal ini dikarenakan jumlah dari petugas dan pemulung tersebut tidak sebanding dengan jumlah sampah yang masuk setiap harinya, sehingga sampah tersebut masih tersisa. Sisa sampah yang tidak habis di pilah dan jenis sampah yang tidak di perintah untuk dilakukan pemilahan itu dilakukan penanaman dengan menggunakan alat berat dan di kelola sehingga menghasilkan gas metan dengan tujuan mengurangi bau busuk yang di timbulkan dari tumpukan sampah.

### *2. Sumber Daya*

Sumber daya menurut Edward III dalam Agustino (2016:138) “Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan”, agar memenuhi semua kebutuhan untuk mencapai semua keberhasilan implementasi tentu saja dibutuhkan sumber daya baik itu tenaga dan sumber daya lainnya. Sumber daya dalam implementasi penyelenggaraan pemilahan sampah yang ada di UPTD TPA Ganet jika dilihat dari sumber daya manusianya masih kurang, khususnya dibagian petugas pemilahan sampah.

Hal ini dikarenakan jumlah petugas pemilahan tidak sesuai dengan jumlah sampah yang lebih kurang 80 ton per hari masuk ke TPA, walaupun dalam melakukan pemilahan ini banyak pemulung yang ikut melakukannya. Sementara untuk sumber daya pendukung, seperti sarana dan prasarana pemilahan ini sudah

memadai untuk petugas melakukan pemilahan, baik itu alat untuk mengangkut sampah yang sudah dipilah, alat berat yang digunakan untuk melakukan penimbunan dan juga alat keamanan petugas dalam melakukan pemilahan.

### 3. *Disposisi*

Menurut Edward III dalam Agustino (2016:139) Disposisi adalah "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, bahwa pengangkatan dan penempatan jabatan sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki para pekerja di TPA Ganet tersebut. Sehingga pekerja yang ada di TPA Ganet itu bisa bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan atasan kepadanya. Pekerja yang ada di TPA Ganet ini juga menggunakan rolling system dalam bekerja dengan tujuan agar tidak jenuh dan bosan dalam melakukan pekerjaannya.

Didalam disposisi faktor pengangkatan birokrat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan yang dijalankan. Terkait disposisi yang ada di UPTD TPA Ganet tersebut sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, hal ini tentunya pengangkatan jabatan di UPTD TPA Ganet sudah sesuai dengan kemampuan, dan dasar dari pengangkatan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

### 4. *Struktur Birokrasi*

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:153-154), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa UPTD TPA Ganet Tanjungpinang sudah ada SOP yang telah dibuat yaitu truk/kendaraan sampah membawa sampah masuk ke TPA, truk/kendaraan wajib masuk jembatan timbang di TPA, truk/kendaraan sampah berhenti di jembatan timbang, petugas timbangan TPA mencatat truk/kendaraan, jam masuk, No.Polisi kendaraan, nama supir dan asal sampah, truk/kendaraan sampah keluar jembatan timbang menuju titik bongkar sampah dan membongkar dengan manuver kendaraan sesuai petunjuk petugas lapangan, kemudian baru petugas melakukan pemilahan sesuai dengan jenis sampah yang diperintahkan. Tentunya UPTD TPA Ganet ini sudah bekerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan, sehingga dari sampah masuk ke TPA sampai dilakukannya pemilahan sampah tersebut berjalan sesuai dengan SOP yang ada.

Dari hasil seluruh wawancara dan observasi yang telah dilakukan analisisnya adalah sebelum melaksanakan implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilahan sampah, petugas UPTD TPA Ganet harus terlebih dahulu memahami kebijakan yang akan di jalankan. Dengan memahami kebijakan tersebut tentu petugas yang ada di UPTD TPA Ganet ini lebih mudah untuk melakukan pemilahan sampah, baik itu Kepala UPTD yang sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemilahan sampah, pengawas pemilahan sampah maupun petugas pemilahan yang akan melakukan pemilahan sampah tersebut. Kepatuhan petugas pemilahan sampah merupakan suatu keharusan yang harus dipatuhi

petugas dalam melakukan pemilahan, sehingga dalam melakukan pemilahan petugas tidak melanggar aturan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemilahan sampah.

Dampak nyata dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan dimana yang terdapat di dalamnya pasal 25 ayat 4 mengenai pemilahan sampah yang dibagi menjadi lima katagori, tentunya dengan adanya pemilahan tersebut bisa mengurangi tumpukan sampah yang ada di TPA Ganet dan juga hasil pilahan sampah yang dilakukan yaitu sampah jenis organik ini bisa di proses menjadi kompos. Sedangkan sampah non organik seperti botol, kaleng itu bisa dijual, sementara pemulung juga bisa ikut memilah dengan mengambil jenis sampah yang ada nilai ekonominya, seperti sampah non organik dan sampah yang bisa didaur ulang, sehingga dengan adanya pemilahan sampah tersebut bisa mambantu meningkatkan perekonomian pemulung yang ada. Kemudian sisa sampah yang tidak habis dipilah atau tidak termasuk pilahan ini dilakukan penimbunan dan penanaman yang dikelola agar menghasilkan gas metan, dengan tujuan mengurangi bau busuk yang ditimbulkan tumpukan sampah yang ada.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan (Studi Pada Pemilahan Sampah Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Ganet Tanjungpinang) belum berjalan secara optimal karena belum mengikuti SOP diantaranya belum dilakukan pemilahan sampah yang dibagi atas lima katagori, dan keterbatasan petugas dalam melakukan pemilahan sampah tersebut.

Untuk menjawab tujuan penelitian, kesimpulan juga diambil dari beberapa tolak ukur teori yang dipakai dipenelitian ini yaitu :

1. Dari tolak ukur yang pertama yaitu komunikasi. Dapat disimpulkan dari pembahasan dalam penelitian ini bahwa komunikasi yang ada di UPTD sudah dilakukan dengan melakukan apel pagi yang diikuti seluruh pegawai dan petugas pemilahan. Namun komunikasi yang dilakukan tidak sepenuhnya mengikuti isi dari Perda tersebut.
2. Dari tolak ukur yang kedua yaitu sumber daya. Dapat disimpulkan dari pembahasan dalam penelitian ini bahwa Sumber Daya dalam implementasi penyelenggaraan pemilahan sampah yang ada di UPTD TPA Ganet, baik itu petugas pemilahan sampah dari UPTD maupun pemulung yang masuk ke TPA, jika dilihat dari sumber daya manusianya untuk saat ini masih kurang. Hal ini dikarenakan jumlah petugas maupun pemulung yang melakukan pemilahan tidak sesuai dengan jumlah sampah yang lebih kurang 80 ton per hari masuk ke TPA. Sedangkan sumber daya pendukung yaitu sarana dan prasarana yang ada di UPTD TPA Ganet, sudah memadai untuk petugas melakukan pemilahan samapah.
3. Tolak ukur yang ketiga yaitu Disposisi. Terkait dari segi disposisi sendiri sudah berjalan. Hal ini bisa dilihat dari pengangkatan jabatan yang ada di UPTD TPA Ganet sudah sesuai dengan kemampuang yang dimiliki, ini terbukti dengan berjalannya proses pemilahan sampah meski pemilahan sampah yang dilakukan belum sepenuhnya mengikuti dari isi Perda tersebut.

4. Struktur birokrasi merupakan tolak ukur yang keempat dalam teori yang digunakan dipenelitian ini dan kesimpulan yang dapat diambil adalah Struktur birokrasi dalam implementasi penyelenggaraan pemilahan sampah sudah berjalan. Hal ini terlihat dari proses pemilahan yang berjalan sesuai yang diarahkan, walaupun pemilahan sampah belum sepenuhnya mengikuti isi dari Perda tersebut.

#### B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu agar UPTD TPA Ganet Tanjungpinang mengikuti SOP yang telah ditetapkan dan dilakukan pelatihan bagi petugas pemilahan sampah serta menambah pegawai dibidang tersebut. Saran juga diambil dari beberapa tolak ukur teori yang dipakai dipenelitian ini yaitu ::

1. UPTD TPA Ganet yang saat ini sebagai pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan dimana yang dilihat dari proses pemilahan sampah harus segera melakukan komunikasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi mengenai pemilahan sampah yang dibagi menjadi lima katagori.
2. Dalam menjalankan kebijakan mengenai pemilahan sampah yang akan dilakukan hendaknya UPTD TPA Ganet mampu mengimbangi tenaga kerja yang ada dengan jumlah sampah yang masuk setiap harinya.
3. UPTD TPA Ganet sebagai pelaksana Perda agar lebih meningkatkan lagi proses pemilahan sampah yang dilakukan.
4. UPTD TPA Ganet sebagai pelaksana Perda agar melakukan pemilahan sampah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Perda tersebut mengenai pemilahan sampah yang dibagi kedalam lima katagori.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Cv Alfabeta
- Dunn, William N. 2009. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik II*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C. Congressional Quarterly Press
- Narbuko, Cholid. Achmadi, Abu. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah*. Jakarta: KENCANA.
- Nugroho, Riant, Dwijowijoto. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. Elex Media Komputindo
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governace*. Bandung. Refika Aditama
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama : Jakarta Pers.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik; Teori dan Proses (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Media Presindo.
- 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jogjakarta; CAPS.

### B. Jurnal

- Anugerah, Yudi, Purwadi. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah)*. JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

Chandra,Santhy. Dkk. *Analisis Teknologi Pengolahan Sampah Di Kupang Dengan Proses Hirarki Analitik Dan Metode Valuasi Kontingensi*. J. Manusia Dan Lingkungan, Vol. 22, No. 3, November 2015.

Nurmalasyaiah dan Lilis,Suryani. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong (Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah)*. PubBis. Jurnal Ilmu Administrasi Publik & Bisnis. Vol 1, No. 3, Maret 2018.

Ramdhani,Abdullah dan Ramdhani,Muhammad Ali. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12

Rendy, Mohammad. *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Kebersihan Dan Pertanaman Kota Palu*. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, Nopember 2015.

Said,Agus, dkk. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 4, No. 1 (2015)

Talib. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Palu*. e-Jurnal Katalogis, Volume 2 Nomor 1, Januari 2014

### **C. Dokumen**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.